

**PENGARUH BELANJA MODAL, DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH**

**THE EFFECT OF CAPITAL EXPENDITURE, BALANCE
FUND PERFORMANCE TOWARD THE GOVERNMENT
FINANCIAL PERFORMANCE**

**INDAH PERMATA NURMALA
8335097694**



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta
2014**

ABSTRAK

Indah Permata Nurmala, Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh belanja modal, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah belanja modal, dana perimbangan sebagai variabel independen sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05. Sampel akhir dari penelitian terdiri dari 103 jumlah keseluruhan dari Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012, dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan hanya dana perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Indah Permata Nurmala, The effect of Capital Expenditure, Balance Fund Performance Toward the Government Financial Performance (Regency/ City in Central Java Period 2010-2012) faculty of economy State university of Jakarta, 2014.

. This research aims to analyze The effect of Capital Expenditure, Balance Fund Performance Toward the Local Government Financial Performance (Regency/ City in Central Java Period 2010-2012)..the factors examined in this research are capital expenditures and balance fund as the independent variables while the local government financial performance as the dependent variable..The method used is multiple regression analysis with a significance level of 0.05. The final sample of the study consisted of 103 the total number of district and city located in Central Java province in 2010-2012 , using purposive sampling method..Data used in the research is a secondary one. Simultaneous hypothesis testing results shows that all three independent variables significantly affect the dependent variable , which is the financial performance of local government. While the partial result of the research shows only the balancefund that has a significant effect on the financial performance of local government .

Keyword : capital expenditure, balance fund, financial performance of local government

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

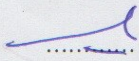
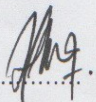
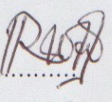
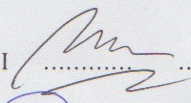
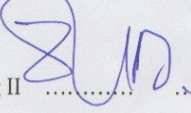
Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus.

NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Indra Pahala, SE, M.Si</u> NIP. 19790208 200812 1 001	Ketua	
2. <u>Susi Indriani, SE, M.S.Ak</u> NIP. 19760820 200912 2 001	Sekretaris	
3. <u>Rida Prihatni, SE, Akt, M.Si</u> NIP. 19760425 200112 2 002	Penguji Ahli	
4. <u>Ratna Anggraini ZR, SE, Akt, M.Si</u> NIP. 19740417 200012 2 001	Pembimbing I	
5. <u>Dra. Ety Gurendrawati, M.Si</u> NIP. 19680314 199203 2 002	Pembimbing II	

Tanggal Lulus 24 juni 2014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan Karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juni 2014
Yang membuat pernyataan



Indah Permata Nurmala
NIM : 8335097694

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012). Banyaknya halangan dan rintangan yang dihadapi selama masa perjuangan demi menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwasanya dalam proses penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga akhirnya segalanya dapat terselesaikan. Dalam kesempatan berharga ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. Dedi Purwana SE, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Bapak Indra Pahala, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
4. Ibu Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta.

5. Ibu Ratna Anggraeni, SE, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberi banyak masukan dan saranyang berarti serta support dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Etty Gurendrawati, M.Si, Ak, selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, masukan, saran, kritik, support dan arahnya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Marsellisa Nindito, SE, Akt.,M.Sc dan Choirul Anwar, MBA., MAFIS., CPA selaku Penguji Ahli I dan Penguji Ahli II penulis pada saat Seminar Usulan Proposal, yang telah memberikan motivasi ketika jatuh sehingga penulis bisa tetap melanjutkan hingga ke tahap skripsi.
8. Seluruh dosen pengajar FE Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta yang tentu saja telah berjasa dengan tulus berbagi ilmu kepada penulis dan segenap mahasiswa/I lainnya dan karyawan di Fakultas Ekonomi.
9. Orang tua tercinta yang telah melimpahkan kasih sayang dukungan, inspirasi, masukan, kritikan, motivasi dan solusi yang membuat penulis menjadi manusia yang kuat.
10. Ardyantoro Hani Taufik yang sebagai teman baik yang tak henti mendukung dan banyak membantu baik dari segi moral maupun material sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
11. Putut Anggun Nurmala selaku kakak ku tersayang yang telah banyak membantu dan memberi dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi ini serta adikku tercinta Elok Rusmeita Nurmala .

12. Isyana Kaniadevi, Theodora Ririn Hastarini dan Dika Anggary selaku teman dekat yang sangat berperan tidak hanya memberikan keceriaan ketika bermain, namun juga dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi.
13. Ieneke Mega Saraswati, Rica Ayu Triani, Indah Ayu, Sherli, Rizki P, Nanda D yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman S1 Akuntansi Non-Reguler 2009 yang tidak bias disebutkan satu persatu untuk semua dukungan dan bantuannya.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan didalam skripsi ini. Maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menjadikan lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat kedepannya.

Jakarta, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Lampiran	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Kegunaan Penelitian	8
Bab II Kajian Teoretik	10
A. Deskripsi Konseptual	10
1. Kinerja Keuangan Daerah	10
2. Belanja Daerah	20
2.1 Belanja Daerah kaitannya Dengan Belanja Modal	22
3. Dana Perimbangan	25
3.1 Dana Bagi Hasil	26
3.2 Dana Alokasi Umum (DAU).....	27
3.3 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	29
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	30
C. Kerangka Teoritik.....	34
D. Perumusan Hipotesis Penelitian	36
Bab III Objek dan Metodologi Penelitian	39
A. Tujuan Penelitian.....	39
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	39
C. Metode Penelitian	40
D. Populasi atau Sampling atau Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	43
1. Statistik Deskriptif	43
1.1 uji Asumsi Klasik	44
2. Regresi Linear Berganda.....	47
2.1 Uji Hipotesis	48

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	51
A. Deskripsi Data	51
4.1.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	52
B. Pengujian Hipotesis.....	55
4.2.1 Uji Normalitas	55
4.2.2 Uji Multikolinearitas	58
4.1 .3 Uji Heterokedastisitas.....	60
4.2.4 Uji Autokorelasi	61
4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda	62
4.2.6 Uji Statistik t dan F	64
4.2.7 Uji koefisien determinasi	67
C. Pembahasan	68
4.3.1 Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan.....	68
4.3.1 Dana Perimbangan Mempengaruhi Kinerja Keuangan	71
4.3.3 Belanja Modal, Dana Perimbangan Mempengaruhi Kinerja Keuangan	73
Bab III Kesimpulan, Implikasi dan Saran	75
A. Kesimpulan	75
B. Implikasi	76
C. Saran	77

Daftar Pustaka

Lampiran

Riwayat Hidup

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Data Realisasi Belanja Modal	82
2	Data Realisasi Dana Perimbangan	85
3	Data Realisasi Kinerja Keuangan	88
4	Hasil Outlier	91
5	Hasil Uji Statistik Deskriptif	96
6	Hasil Uji Normalitas dengan skewness kurtosis	96
7	Hasil Uji Normal Probability plot	97
8	Hasil Uji Normal dengan Kolmogorov Smirnov	97
9	Hasil Uji Multikolerasi	98
10	Hasil Uji Heterokedastisitas	98
11	Hasil Uji Autokorelasi	98
12	Hasil Regresi Linear Berganda	98
13	Hasil Uji t	99
14	Hasil Uji F	99
15	Hasil Uji Koefisien Determinasi	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Data Desentralisasi Fiskal	2
1.2	Data Realisasi Belanja Modal	4
2.1	Parameter Kinerja	14
2.2	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	19
2.3	Review Penelitian Terdahulu	32
3.1	Pengambilan Keputusan ada tidaknya Autokorelasi	46
4.1	Jumlah Sampel Penelitian	51
4.2	Uji Statistik Deskriptif	52
4.3	Uji Normalitas	56
4.4	Uji Kolmogorov Smirnov	58
4.5	Uji Multikolinearitas	59
4.6	Uji Park	61
4.7	Uji Autokorelasi	62
4.8	Analisis Regresi Linear Berganda	63
4.9	Uji t	65
4.10	Uji F	67
4.11	Uji Koefisien Determinasi	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Teoritik	34
2.1	Uji Probability Plot	57
2.1	Grafik Scatterplot	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintahan daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat diharapkan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai

pelaksanaan otonomi daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintahan daerah dalam penelitian ini memakai rasio desentralisasi fiskal. Pengukuran desentralisasi fiskal menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Jika pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan maka kinerjanya jelek.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat

desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio Pengelolaan dan pertumbuhan.

Table 1.1 Data Desentralisasi Fiskal

Di Provinsi Jawa

Provinsi	2010	2011	2012
Prov. DKI Jakarta	0.56	0.63	0.62
Prov. Jawa Barat	0.74	0.77	0.60
Prov. Jawa Tengah	0.72	0.74	0.56
Prov. DI Yogyakarta	0.54	0.54	0.46
Prov. Jawa Timur	0.74	0.77	0.62
Prov. Banten	0.74	0.77	0.62

Sumber : Situs DJPK, diolah 2014

Jika dilihat dari table 1.1 kinerja keuangan pemerintah daerah masih sangat kurang baik, dikarenakan skala interval derajat desentralisasi fiskal yang sangat baik mencapai >50.00. bahkan di beberapa provinsi terdapat penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dihitung dengan rasio desentralisasi fiskal seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Dengan adanya pengukuran kinerja keuangan ini diharapkan pemerintah daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Mengingat adanya tuntutan dari masyarakat atas laporan pertanggungjawaban yang transparan, Laporan keuangan daerah masih dianggap memiliki keterbatasan penyajian yang sifat dan cangkupannya berbeda dengan penyajian pada sektor swasta. Seharusnya otonomi daerah ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih memajukan pemerintahannya dengan menaikan PAD pada setiap daerahnya, karena semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan menunjukkan semakin bagus kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan adanya otonomi daerah merupakan langkah yang bagus bagi pembangunan daerah. Selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kualitas layanan publik yang dapat dinikmati sebagian besar masyarakat. Otonomi daerah juga dapat meningkatkan pengeluaran belanja modal seperti infrastruktur dan prasarana pembangunan jalan tol, mal, sarana hiburan dan lain-lain. Menurut Direktorat Jendral Anggaran memamparkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset dalam waktu satu periode akuntansi. Aset-aset inilah yang digunakan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya, pemerintahan daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal.

**Table 1.2 Data realisasi belanja Modal
Dan Belanja Pegawai di Jawa Tengah**

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Modal
2010	18,620,249,000,000.00	3,080,280,000,000.00
2011	16,541,452,000,000.00	4,113,103,000,000.00
2012	23,881,495,000,000.00	6,349,587,834,456.00

Sumber : Situs DJPK, diolah 2014

Pada kenyataannya penggunaan belanja modal belum dapat dioptimalkan bagi sebagian besar pemerintah daerah. Menurut Republika.co.id (2013) Kementrian keuangan (kemenkeu) mengungkapkan sejumlah daerah di Indonesia memiliki porsi belanja pegawai mencapai 70-80 dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika kondisi ini dibiarkan dengan tergerusnya belanja publik dalam jenis belanja barang dan belanja jasa serta belanja modal oleh belanja pegawai, maka dampak terburuk bagi daerah adalah kebangkrutan.

Seharusnya belanja modal lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pegawai karena sebagai upaya untuk mendukung dalam pembangunan daerah. Salah satu upaya adalah dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana umum yang dapat dinikmati masyarakat. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. meningkatnya belanja modal berarti pemerintah telah meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga masyarakat dapat lebih produktif dalam melakukan pekerjaannya dan dapat membayar segala macam bentuk pajak dan retribusi daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sumber penerimaan lainnya yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah dana perimbangan yang juga merupakan salah satu penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dana perimbangan merupakan dana yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana perimbangan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola dana tersebut, apakah akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah atau tidak.

Perbandingan jumlah PAD maupun dana transfer dari pemerintah pusat bisa menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Semakin besar jumlah PAD dibandingkan jumlah dana transfernya menunjukkan semakin mandiri daerah tersebut. tetapi jika dilihat dari realita dalam pencapaian PAD di hampir semua

daerah di Indonesia bukan kemandirian yang ada justru tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat yang semakin besar. Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut belum mandiri dalam mengelola keuangannya. Maka dari itu pemerintah lebih banyak menjadi “pengemis” dengan mengharapkan dana perimbangan yang dikirim dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah untuk mendanai daerahnya. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Peranan Belanja Modal dan Dana perimbangan sangat besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang pada akhirnya mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, seharusnya aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat bertambah setiap tahunnya sehingga dapat digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat secara maksimal. Jika pengalokasian dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka masyarakat akan semakin sejahtera dan pertumbuhan ekonomi daerah juga semakin baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ketahun salah satunya untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Penelitian mengacu pada penelitian sebelumnya tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Aceh. Yang membedakan dari

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya memakai PAD digantikan dengan Belanja Modal, pengukuran kinerja keuangannya menggunakan rasio efisiensi diganti dengan menggunakan pengukuran rasio Desentralisasi Fiskal keuangan daerah. Kemudian data sampel yang diambil lebih banyak dari sampel penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi peningkatan Kinerja Keuangan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasannya penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cangkupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
2. Penggunaan belanja modal yang belum dapat dioptimalkan pada sebagian besar pemerintah daerah.
3. Besarnya belanja pegawai dibanding belanja modal membuat kinerja keuangan pemerintah menurun.
4. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat membuat daerah tersebut tidak mandiri.

C. Batasan Masalah

Dengan pertimbangan kepentingan peneliti, keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman peneliti dan permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan penelitian yang meliputi yaitu Variabel independen yang diuji yaitu mengenai pengaruh Belanja modal dan dana perimbangan dengan variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah terdapat pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberi nilai kegunaan atas kebermanfaatannya baik secara teoretis maupun secara praktis bagi:

1. Kegunaan secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan hubungan antar variabel secara empiris dilapangan dari konsep-konsep yang ada sehingga mampu mendukung pengembangan penelitian mengenai pengaruh Belanja modal, Dana Perimbangan terhadap Kinerja Pemerintah Keuangan Daerah.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi pemerintahan daerah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintahan daerah untuk lebih bisa memanfaatkan transfer dana yang diberikan dari pemerintahan pusat bersamaan dengan pendapatan asli daerah yang diterima sendiri sebaik-baiknya agar efisien.
- b. Bagi pembaca dan penelitian selanjutnya diharapkan bisa menarik manfaat yang terkandung didalam penelitian guna memberikan bahan pengetahuan mengenai Belanja Modal, Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah, serta dapat menjadi referensi penelitian yang relevan dike, mudian hari.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pengertian kinerja menurut mahsun (2006:25) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi. Pandangan tradisional terhadap pengukuran kinerja organisasi sering hanya menekankan pada minimasi biaya (input), misalnya dengan penghematan biaya operasional. Sistem pengukuran kinerja modern selain menilai input dan output juga menilai tingkat fleksibilitas organisasi melayani pelanggan. Dalam melakukan pengukuran kinerja pada pemerintah sudah selayaknya meninggalkan pandangan tradisional dan beralih pada pandangan modern. Hal ini karena semua jasa dan produk yang dihasilkan pemerintah ditujukan untuk memenuhi harapan dan keinginan pelanggan (masyarakat).

Pengukuran kinerja memiliki beberapa tujuan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2002:122) adalah :

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan.
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Disamping tujuan, pengukuran kinerja juga memiliki beberapa manfaat.

Manfaat pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2002:122) antara lain :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaikinya.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

- f. *Membantu* mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan proses instansi pemerintah.
- h. Memahami bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Pada kebanyakan organisasi swasta, ukuran kinerja adalah berupa tingkat laba. Namun organisasi sektor publik (pemerintah) tidak bisa menggunakan ukuran laba ini untuk menilai keberhasilan organisasi karena memang tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba tapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu output organisasi sector publik (pemerintah) pada umumnya bersifat *intangible* dan *indirect* menjadi kendala tersendiri dalam melakukan pengukuran kinerja. Menurut Mahsun (2006:21), beberapa kendala pengukuran kinerja organisasi sector publik (pemerintahan) antara lain :

1. Tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba.
2. Sifat output adalah kualitatif, intangible dan indirect.
3. Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung.
4. Tidak beroperasi berdasarkan market force sehingga memerlukan instrument pengganti mekanisme pasar.
5. Berhubungan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat).

Menurut Lehman (2003; dalam Mahsun, 2006:71), indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Indikator kinerja suatu organisasi hendaknya dapat

dipahami secara sama, baik oleh manajemen maupun stakeholder. Dengan indikator yang sama dan persepsi yang sama maka penilaian keberhasilan diharapkan menggunakan criteria yang sama sehingga lebih objektif. Jadi dengan adanya indikator yang jelas diharapkan akan menciptakan konsensus berbagai pihak, baik internal maupun eksternal untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program dan dalam menilai keberhasilan suatu instansi pemerintah. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan.

Tabel 2.1
Parameter Kinerja

No	Parameter Kinerja	Pokok-pokok Aturan Keuangan Daerah Setelah Otonomi Daerah
1	Desentralisasi fiskal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaturan adanya tambahan penerimaan daerah dari PPh orang pribadi kepada Daerah lebih memperbesar peluang bertambahnya penerimaan daerah. b. Adanya kenaikan persentase dan penetapan batasan terendah atas penerimaan Bagi Hasil Pajak yang merupakan hak Kabupaten/Kota yang dikelola provinsi. c. Besarnya Dana/Alokasi Umum sebagai bagian dari Dana perimbangan yang diterima daerah ditentukan dengan memperhatikan potensi daerah seperti PAD, PBB dan BPHTB.
2	Upaya Fiskal	Ketegasan cakupan wilayah objek pajak yang dapat membantu pemda dalam menentukan potensi riil penerimaan pajak dan menghindari sengketa objek pajak dengan pemda lainnya.
3	Kemampuan pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang 34 Tahun 2000 mendukung eksistensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah daerah sendiri dan dipungut di daerah sendiri.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengertian wajib pajak dalam UU ini lebih luas dari sekedar yang diatur sebelumnya termasuk organisasi massa dan organisasi social politik akan memperbesar penggalan potensi penerimaan pajak bagi pemerintahan daerah. c. Peralihan sebagian jenis parker dari retribusi menjadi pajak sehingga penetapan lebih jelas. d. Jasa dalam retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. e. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber perdaftaran daerah yang pontesial. f. Perizinan dalam retribusi termasuk kewenangan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
4	Efisiensi penggunaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupaka batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. b. Daerah dapat membentuk dana cadangan dari penerimaan daerah, kecuali dana alkasi khusus dan pinjaman daerah. c. Pemda dapat menempatkan dana dalam bentuk deposito sepanjang tidak mengganggu likuiditas pengeluaran daerah.

Sumber: (Azhar, 2008)

Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangam daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk Kinerja tersebut berupa Rasio keuangan yang terbentuk dari Unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Perhitungan APBD.

Permendagri No.13 Tahun 2006 menyebutkan pengertian kinerja sebagai berikut, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dari berbagai pengertian tersebut, kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan. Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan adalah suatu proses yang mengelola input menjadi output (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis.

Tujuan dari kinerja antara lain :

1. Meningkatkan prestasi kerja staf, baik secara individu maupun dalam kelompok.
2. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan meningkatkan hasil kerja melalui prestasi pribadi.
3. Memberikan kesempatan kepada staf untuk menyampaikan perasaannya tentang perkerjaan, sehingga terbuka jalur komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga dalam teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel analisa rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengangkutanansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki swasta.

Analisa rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Salah satu alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan daerah yang merupakan inti pengukuran kinerja sekaligus konsep pengelolaan organisasi pemerintah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat luas. Hasil analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk (Halim, 2002:126)

1. Menilai, kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasi pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Halim (2002) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio upaya fiskal, rasio desentralisasi fiskal

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah pusat dan pinjaman propinsi}}$$

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1

(satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

c. Rasio Aktifitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja ruti dan belanja pembangunan secara optima. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{total belanja rutin}}{\text{total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

d. Rasio Upaya Fiskal

Bagian ini akan mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD).

$$\text{Rasio Upaya Fiskal} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Asli daerah}}$$

Semakin tinggi hasil rasionya, akan semakin terlihat bahwa upaya pemerintah daerah semakin lebih baik dan adanya perencanaan yang baik dalam mengelola pendapatan.

e. Rasio Desentralisasi Fiskal

Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah.

Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penemuan Tim fisipol UGM menggunakan skala Interval sebagaimana yang terlihat dalam table berikut

Table 2.2

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD(%)	Kemampuan Keuangan Daerah
<10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Cukup
30.01 – 40.00	Sedang
40.01 – 50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber : halim (2004:106)

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2. BELANJA DAERAH

Komponen berikutnya dari APBD adalah belanja Daerah. belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Pusdiklat BPKP,2007).

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.

Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari :

- a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
- b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan Negara.

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan Negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari :

- a. Pelayanan umum
- b. Ketertiban dan keamanan
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan Hidup
- e. Perumahan dan fasilitas umum
- f. Kesehatan
- g. Pariwisata dan budaya
- h. Agama
- i. Pendidikan; serta
- j. Perlindungan sosial

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal
- d. Bunga
- e. Subsidi
- f. Hibah
- g. Bantuan sosial
- h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
- i. Belanja tidak terduga

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2.1 BELANJA DAERAH kaitannya dengan BELANJA MODAL

Menurut undang-undang 33 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Menurut Halim (2002) belanja dalam akuntansi pemerintahan menurut karakteristiknya diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu belanja modal (belanja pembangunan) dan belanja selain modal (contoh: belanja administrasi umum, belanja transfer, dll).

Sedangkan menurut Permen No.13 2006, klasifikasi belanja daerah dibagi menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat dalam permen No.13 adalah terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, antuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Sementara itu kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 Permen No.13 tahun 2006 dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam permendagri 13 tahun 2006 digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.02/2011 belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

a. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administrative sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaries, dan pajak (kontraktual).

d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai asset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, Irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian

barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

f. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian asset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Indikator variable belanja modal diukur dengan :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

3. DANA PERIMBANGAN

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah.

Pada aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah ini Elmi (2002:55) mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan yang

jumlahnya lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri atas : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi dan Dana Alokasi Khusus.

Beberapa jenis dana yang dapat dikendalikan oleh daerah dan mana yang tidak. DBH merupakan jenis dana yang dapat dikendalikan, dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya. DAU, dihitung dengan formula tertentu yang relatif kecil dapat dipengaruhi besarnya oleh pemerintah daerah. DAK, bagi pemerintah daerah tingkat tertentu masih mungkin dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya meskipun kebijakan sepenuhnya tergantung pusat (Mahmudi, 2009:27)

Indikator variabel Dana Perimbangan diukur dengan :

$$\text{Dana Perimbangan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

3.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

Menurut Elmi (2002:56) dana perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah yaitu pembagian hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dan penerimaan perpajakan (*tax sharing*). Termasuk dalam pembagian hasil

perpajakan adalah: pajak perseorangan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari: minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan

3.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah.

Fungsi DAU adalah sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Menurut Yuwono, dkk (2008), Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proposi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Sedangkan menurut wijaya (2007) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.

Didalam buku Akuntansi pemerintahan (Nordiawan *et al.*, 2007:56), DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan :

1. Jumlah seluruh DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25-26% dari endapatan Dalam Negeri Netto.
2. Propinsi DAU antar provinsi dan Kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Jika penentuan proposi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proposi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%.

Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan oleh besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya tinggi tetapi kebutuhan fiskalnya rendah akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskal yang rendah, tetapi kebutuhan fiskalnya tinggi akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening umum daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan

masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

3.2 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapat APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 Tahun 2004). Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah (Adisasmita, 2010:182) :

1. Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan dikawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/ prasarana baru, pembangunan jalan dikawasan terpencil serta saluran irigasi primer.
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah-daerah yang

menpunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN (Adisasmita, 2010:182).

Pengalokasian DAK tidak bisa ditetapkan dalam jumlah mutlak setiap tahunnya karena melihat adanya ketersediaan dan dana dalam APBN. Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata nasional. Kemampuan fiskal daerah di dasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan umum daerah dengan belanja pegawai negeri sipil daerah pada APBD tahun anggaran. Secara khusus, fungsi DAK adalah untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoprasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihiin tiga tahun (Adsasmita,2010:182).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Fajar N (2012) meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli daerah sebagai Variabel Intervening studi kasus di provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian belanja Modal secara signifikan berpengaruh negative secara langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.dan belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Ebit juliawati, Darwanis, Jalaludin (2012) meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Cherry Dhia Wenny (2012) meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Gideon Simanullang (2013) meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal, *Intergovernmental* Revenue dan Pendaatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2008-2012. Hasil penelitian adalah 1) H1: belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. 2) H2: *Intergovermental Revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dibuktikan dari hasil Uji-F dan Uji-T menunjukkan berpengaruh sebesar 20,76% dan H3 : berpengaruh signifikan dan Terbukti sebesar 23,93%. Sedangkan H4: secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di provinsi kepulauan riau.

Asha Florida (2007) meneliti tentang pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yang diukur dengan rasio aktivitas. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran (LRA)

selama periode tahun 2002-2006. Dalam penelitian ini menggunakan populasi penelitian seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD saja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara, sedangkan hasil perusahaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Sementara secara simultan PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.3

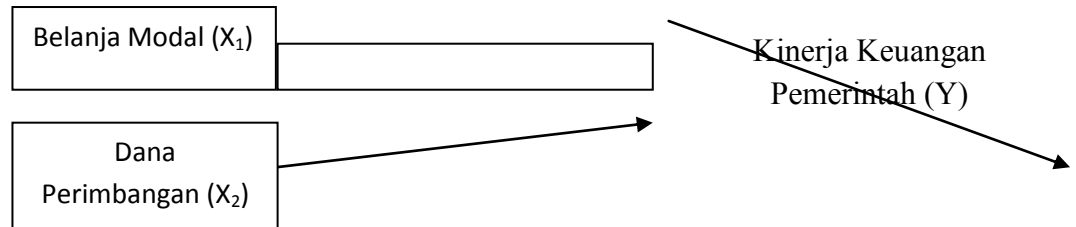
Review Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nugroho 2008	Pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan asli daerah sebagai variable intervening pada provinsi jawa tengah	Variabel independen adalah Belanja Modal sedangkan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan kinerja keuangan	Belanja Modal secara signifikan berpengaruh negative secara langsung terhadap kinerja keuangan dan belanja modal belanja secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah.
2	Julawati Ebit, Darwanis dan jalaluddin (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	Variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) sedangkan variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Pemerintah(Y).	secara simultan dan parsial Pendapatam Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3	Cherry D. (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan kota Di Propinsi Sumatera Selatan	Variabel independen pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (X), sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan (Y).	Pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di propinsi Sumatera Selatan. Secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota dipropinsi Sumatera Selatan.
4.	Gideon Simanullang(2013)	Pengaruh Belanja Modal, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan riau	Variabel independen pada penelitian ini adalah Belanja Modal (X1), <i>Intergovernmental revenue</i> (X2), Pendapatan Asli Daerah(X3), sedangkan Variabel dependen adalah Kinerja Keuangan (Y).	H1 : Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, H2 : <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, H3 : Pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, H4: secara bersamaan bahwa belanja modal, <i>intergovernmental revenue</i> dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
5	Asha Florida (2007)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara	Pajak Daerah (X ₁), Retribusi Daerah (X ₂), Laba BUMN (X ₃), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (X ₄), sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan (Y)	Secara simultan ada pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan kperintah, namun secara parsial, hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang dominan mempengaruhi keuangan kab/kota di Propinsi Sumut.

Sumber : data diolah penulis (2013)

C. Kerangka Teoritik



Gambar 2.1

Model Kerangka Berpikir mengenai Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah mengeluarkan laporan APBD sebagai cerminan hasil kinerja yang telah dilakukan selama satu periode anggaran. Didalam APBD terkandung pos pendapatan dan pos belanja. Lebih rinci lagi, pada pos pendapatan terdapat penerimaan seperti dalam bentuk PAD, lain-lain pendapatan yang sah dan penerimaan transfer yang berasal dari pusat berupa dana perimbangan yaitu DAU, DAK dan DBH. Pada pos belanja terdapat Belanja daerah yang didalamnya masih terdapat banyak komponen lainnya. Salah satu jenis belanja yang dilakukan pemerintah adalah belanja modal dalam kaitannya dengan pembelian asset tetap, yakni yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Selanjutnya, asset dan asset tetap yang telah dibeli harus dijaga dan dipelihara sehingga ketika akan digunakan lagi masih dalam kondisi yang baik dan siap pakai, sesuai dengan umur ekonomis yang dimiliki. Dengan penggunaan belanja modal yang efektif dan efisien, maka fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, toilet umum, taman hiburan, dan sebagainya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Hal ini membuat masyarakat yang merasakan fasilitas-fasilitas merasa puas akan

pembangunan daerah dan perubahan yang terjadi di daerah mereka. Mereka pun akan dengan rela membayar retribusi maupun pajak sebagai bentuk rasa tanggung jawab mereka terhadap pemerintah daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintahan pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Kinerja keuangan daerah adalah sebagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah yang dikatakan sebagai pendapatan asli daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida,2007). Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh belanja modal yang dihasilkan pemda, serta Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat dengan melihat kinerja keuangan daerah. Apakah terdapat pengaruh positif dari alokasi dana yang asalnya berbeda terhadap kinerja keuangan? Selanjutnya peneliti akan menggunakan metode penelitian yang sesuai untuk menjawab hipotesis yang ada.

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah Belanja Modal dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Untuk selanjutnya peneliti akan bekerja berdasarkan hipotesis ini mulai dari pengumpulan data yang relevan dengan hipotesis sampai pada pengujinya.

1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintahan daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Penelitian yang dilakukan Nugroho (2012) menunjukkan bahwa semakin besar Belanja modal maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan penggunaan belanja modal yang efektif dan efisien, maka fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, toilet umum, taman hiburan, dan

sebagainya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Hal ini membuat masyarakat yang merasakan fasilitas-fasilitas merasa puas akan pembangunan daerah dan perubahan yang terjadi di daerah mereka. Mereka pun akan dengan rela membayar retribusi maupun pajak sebagai bentuk rasa tanggung jawab mereka terhadap pemerintah daerah.

H₁ : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU 32 tahun 2004). Penelitian yang dilakukan Ebit (2012) menyebutkan bahwa dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Aceh tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah Prov.Aceh. Hal ini menunjukkan Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintahan pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Semakin banyak pembangun infrastruktur dan sarana prasana maka akan membuat PAD meningkat dengan begitu daerah akan lebih mandiri lagi dan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga bisa dilihat Kinerja Keuangan Pemerintah daerah yang semakin baik.

H3 : Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pemerintahan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono,2005)

Berdasarkan penelitian yang mejadi objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan regresi berganda. Penelitian deskriptif dilakukan dengan mengolah data sekunder atas laporan realisasi APBD Periode 2010-2012. Selain untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah juga menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan, maka penelitian ini disebut juga metode deskriptif analitis.

D. Populasi atau Sampling atau Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

Sekaran (2003:265) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, kejadian atau sesuatu yang menarik. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.

2. Sampel

Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, dimana sampel penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria tertentu yang dikehendaki peneliti dan kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Kepada daerah di Jawa Tengah yang menyerahkan laporan realisasi anggaran minimal laporan realisasi anggaran dan perencanaan anggaran tahun 2010-2012.
- b. Pada laporan realisasi APBD tersebut tercantum Belanja Modal, Dana Perimbangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara melakukan pengunduhan melalui situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data untuk laporan realisasi keuangan daerah berupa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan juga APBD pada tahun 2010-2012 seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Variabel Bebas (Independen)

Variabel *independen* (bebas) Ghozali (dalam Indraningrum,2011) menjelaskan bahwa disebut variabel independen karena variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel *antiseden* (sebelumnya).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (X1) dan Dana Perimbangan (X2), yang menjadi indikator untuk masing-masing variabel yaitu :

a. Belanja Modal (X1)

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya oprasi dan pemeliharaan. Alat ukur pada variabel ini adalah pos belanja modal pada laporan realisasi APBD (Mahmudi,2010).

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

b. Dana Perimbangan (X2)

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya berupa Dana Bagi Hasil, Djana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Alat ukur pada variabel ini adalah pos Dana Perimbangan pada laporan realisasi APBD (Gideon S, 2013).

$$\text{Dana Perimbangan} = \frac{\text{Dana Perimbang an}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen (terikat) Ghozali menjelaskan (dalam Indraningrum, 2011) karena variabel ini dipengaruhi variabel sebelumnya.

Variabel terikat pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kinerja keuangan pemerintah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi

kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Alat ukur Kinerja Keuangan Daerah dapat diukur dengan menilai rasio Desentralisasi Fiskal (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda adalah analisis mengenai dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen.

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel dependen yang diketahui (Gujarati dalam Rachmawati,2010).

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *standart deviasi*, *varian*, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range* dan sebagainya (Ghozali, 2011).

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan.

1.1 uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan karena menjadi persyaratan regresi agar model linier tidak bias sebagai estimator. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi:

1.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, Ghazali (2011 : 160). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dari residualnya, Ghazali (2011 : 163). Dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Normalitas data dapat diuji dengan melihat nilai kurtosis dan *skewness* dapat dihitung dengan rumus:

$$Z_{skewness} = \frac{Skewness}{\sqrt{6} \sqrt{N}}$$

Sedangkan nilai z kurtosis dapat dihitung dengan rumus:

$$Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\sqrt{24} \sqrt{N}}$$

Dimana N adalah jumlah sampel, jika nilai Z hitung < Z table, maka data berdistribusi normal. Pada tingkat signifikansi 0,05 nilai Z table adalah 1,96.

1.1.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal artinya, variabel nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi digunakan uji dengan melihat nilai tolerance dan lawannya yaitu nilai *variance inflation factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, Ghozali (2011 :105).

1.1.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode t-1. Jika terjadi, maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali, 2011:110).

Ada beberapa cara menguji apakah ada autokorelasi atau tidak, salah satunya menguji dengan Uji Durbin-Watson (DW Test) :

Tabel 3.1

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis nol	keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative	Tidak ditolak	$D_u < d < 4 - d_u$

Sumber : Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19, 2011

1.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011 : 139), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik

scatterplot. Pengujian scatterplot, model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu, dapat diuji dengan statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Dalam penelitian ini digunakan uji park. Uji park dilakukan dengan cara mengregresikan nilai residual (L_{nei2}) dengan masing-masing variabel independen (L_{nx1} dan L_{nx2}). Apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, Ghazali, (2011 :142). Apabila terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi, maka dapat dilakukam transformasi variabel untuk mengobatinnnya. Salah satu caranya adalah dengan transformasi dalam bentuk logaritma, Ghazali (2011 : 145).

2. Regresi linear berganda

Pengertian regresi linier berganda menurut sugiyono (dalam Annisa, 2011) menyatakan bahwa, analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai independen dinaikan/diturunkan.

Kegunaan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui arah hubungan apakah terdapat hubungan positif atau negatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang mengalami kenaikan atau penurunan.

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, yaitu :

$$Y = \beta_1 BM + \beta_2 DP + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah

BM = Belanja Modal

DP = Dana Perimbangan

β_1, β_2 = konstanta dan koefisien regresi

ε = variabel gangguan yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

2.1 Uji Hipotesis

2.1.1 Koefisien Determinasi

Pada intinya yang mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97).

2.1.2 Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (terpisah). Jika dalam kasus ini, yang ingin dilihat adalah PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah atau Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah, masing-masing dilakukan secara satu-persatu. Dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t dapat juga dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output. Hasil regresi menggunakan SPSS. Jika angka signifikansi t lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen, Ghozali(2011 : 98).

2.1.3 Uji Simultan (Uji-F)

Nachrowi (2006 : 20) menyatakan bahwa uji-F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan. Hasil dari F hitung akan dibandingkan dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Pada kasus ini, peneliti ingin melihat apakah terdapat pengaruh apabila seluruh variabel bebas yaitu PAD dan Dana Perimbangan di regres secara serentak terhadap Kinerja Keuangan Daerah hasil signifikansi harus dibawah tingkat asignifikasi standar yaitu 0,05 (5%). Pengujian dilakukan menggunakan program SPSS.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Peneliti memilih kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah sebagai sampel dalam penelitian. Periode tahun yang digunakan adalah 2010-2012. Adapun penggunaan sampel lebih lanjut bergantung kepada pemenuhan persyaratan, seperti :

1. Seluruh kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah menyerahkan laporan realisasi APBD tahun 2010-2012 di DJPK.
2. Pada laporan realisasi APBD tersebut tercantum Belanja Modal Dana Perimbangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Data yang digunakan peneliti, yang sekaligus menjadi objek lebih lanjut adalah berupa data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi APBD untuk memperoleh variabel bebas yaitu Belanja Modal (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2).

Tabel 4.1

Jumlah Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah	35
Jumlah tahun yang diambil	3
Jumlah observasi Keseluruhan (3x35)	105

Sumber : data diolah peneliti, 2014

Seperti dilihat pada tabel 4.1 mengenai data untuk sampel penelitian. Dijabarkan bahwa sebenarnya terdapat total 35, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Namun, peneliti tidak mencantumkan kota tegal tahun 2010 dan 2012 menjadi sampel karena kota tegal merupakan data yang terkena *outlier* dan harus dibuang. Jumlah sampel keseluruhan yang digunakan menjadi 103 sampel.

4.1.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif diperoleh setelah melakukan regresi terhadap data penelitian yang belum mengalami seleksi *outlier* dan bentuk *transform data* lainnya. Melalui program spss, langkah-langkah memperoleh hasil statistic deskriptif adalah dengan pergi ke menu *analyze-descriptive Statistic-Descriptive* lalu centang pilihan *Mean, Std. Deviation, Minimum* dan *Maximum*.

Dengan hasil ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai penelitian seperti nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Statistik deskriptif dari 105 kabupaten dan kota yang dijadikan sebagai sampel dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan	105	.05	.28	.1031	.04337
Belanja Modal	105	.04	.28	.1356	.04840
Dana Perimbangan	105	.21	.82	.6922	.07795
Valid N (listwise)	105				

Sumber ; SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2014

Tabel 4.2 memberikan penjabaran jumlah sampel seluruhnya yang berkontribusi dalam penelitian ini adalah sebanyak 105 sampel, jumlah keseluruhan kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012.

Dari 105 sampel tersebut dapat dilihat nilai minimum, maksimum, rata-rata serta standar deviasi kabupaten dan kota seperti :

1. Kinerja Keuangan (Y)

Kinerja Keuangan Daerah memiliki nilai rata-rata yang menjadi sampel sebesar 0,1031 atau 10.31% hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah yang dihitung dengan menggunakan rasio desentralisasi fiskal menunjukkan masih kurang dikarenakan pemerintah daerah kurang menggali dan mengelola pendapatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan standar deviasi sebesar 0,04337.

Nilai terendah untuk Kinerja Keuangan Daerah dimiliki oleh Kabupaten Klaten tahun 2010 sebesar 0,05 hal ini dikarenakan Kabupaten Klaten kurang menggali Sumber Daya Alam yang ada didaerahnya sehingga PAD pada Kabupaten Klaten menurun membuat kinerja keuangann pemerintah daerah kurang bagus. Sedangkan untuk nilai tertinggi jumlah Kinerja Keuangan Daerah adalah sebesar 0,28 Kota Semarang. hal ini karena Kota Semarang menggunakan Sumber daya Alam untuk menaikkan pendapatan yang ada pada Kotanya karena semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maka akan menunjukkan semakin bagus kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Belanja Modal

Pada belanja modal (X1), nilai rata-rata yang menjadi sampel sebesar 0,1356 atau 13,56% dari realisasi anggaran belanja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan anggaran untuk alokasi belanja modal belum menjadi prioritas pemerintah daerah yang mana seharusnya adalah 30% sampai 50% dari anggaran belanja pemerintah daerah dan standar deviasi sebesar 0,04840. Perolehan Belanja Modal terendah sebesar 0,04 oleh Kabupaten Klaten tahun 2010, hal ini karena kabupaten klaten lebih menghabiskan anggarannya untuk belanja pegawai daripada belanja modal, oleh sebab itu porsi belanja modal berkurang. Sedangkan nilai tertinggi jumlah belanja modal 0,28 pada kabupaten demak tahun 2012. Hal ini dikarenakan Kabupaten Demak paling banyak meningkatkan infrastruktur dengan membangun fasilitas dan saran pada Kabupaten Demak.

3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,6922 atau 69,22% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mandiri dalam mengelola daerahnya, ketergantungan pada dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah semakin buruk. dan standar deviasi 0,07795. Perolehan dana perimbangan terendah sebesar 0,21 oleh Kabupaten Semarang pada 2012 hal ini dikarenakan Kabupaten Semarang mulai memanfaatkan SDA yang ada di Kabupatennya sehingga menaikkan PAD dan membuat Dana Perimbangan yang tidak terlalu tinggi.

Sedangkan nilai tertinggi jumlah dana perimbangan 0,82 pada Kabupaten Purworejo tahun 2012, hal ini karena Kabupaten Purworejo masih belum mandiri dalam membiayai daerahnya dan masih bergantung pada pemerintah pusat.

B. Pengujian Hipotesis

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam variable pengganggu atau residualnya dapat terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat jumlah dari metode *Skewness* dan *Kurtosis*, dengan Rumus :

$$Z_{skewness} = \frac{Skewness}{\sqrt{6/N} (Jumlah Sampel)}$$

$$Z_{kurtosis} = \frac{Kurtosis}{\sqrt{24/N} (Jumlah Sampel)}$$

selanjutnya, untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi secara normal menggunakan kedua rumus diatas. Jika nilai dari hasil pembagian tersebut berada diantara ± 1.96 untuk tingkat signifikansi 5% maka dapat dinyatakan bahwa data residual tersebut berdistribusi normal dan jika hasil pembagian data tersebut diluar nilai ± 1.96 untuk nilai signifikansi 5% maka dapat dikatakan data tersebut tidak berdistribusi normal. Bahkan, ketika hanya satu yang kurang dari 1.96, tetap tidak bisa dikatakan lolos uji normalitas.

Pada kasus peneliti, awal perhitungan normalitas memberikan hasil yang menunjukkan data tidak terdistribusi secara normal sehingga diperlukan penghapusan data ekstrim, melalui metode outlier, yang menjadi pemicu salah satu tidak normalitas. Ada 2 data yang terkena outlier dan harus dihilangkan, yaitu data dengan nomor urut 35 untuk Kota Tegal tahun 2010 dan 105 untuk Kota Tegal tahun 2012. Hasil uji normalitas yang telah dilakukan peneliti.

Table 4.3
Uji Normalitas

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	103	0.241	0.238	0.074	0.472
Valid N (listwise)	103				

Sumber ; SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2014

Setelah melakukan pengujian dan perhitungan menggunakan perhitungan $Z_{Skewness}$ dan $Z_{Kurtosis}$ maka diperoleh hasil :

$$Z_{Skewness} = \frac{0,241}{\sqrt{6}/103}$$

$$= 0,998$$

$$Z_{Kurtosis} = \frac{0,074}{\sqrt{24}/103}$$

$$= 0,153$$

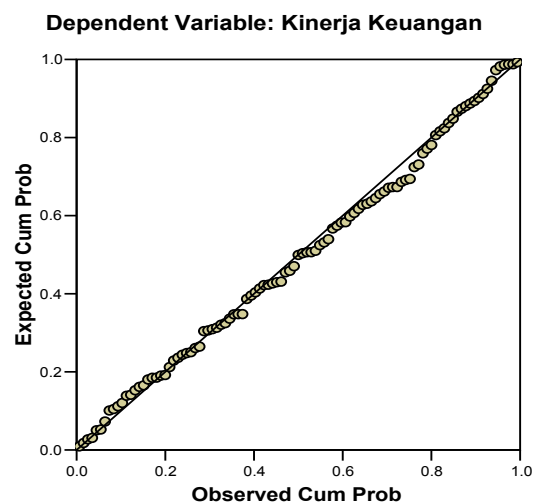
Berdasarkan perhitungan di atas, rasio *skewness* dan rasio *kurtosis* mempunyai nilai berturut-turut sebesar 0,998 dan 0,153. Nilai-nilai tersebut berada diantara $\pm 1,96$ yang berarti data penelitian terdistribusi secara normal.

Selain itu untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal maka dapat dilakukan uji *Normal probability Plot* dimana dalam uji ini data berdistribusi normal jika titik-titik pada grafik *normal plot* menyebar tidak menjauhi garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 4.1

Uji *Probability Plot*

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2014

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal karena penyebaran titik-titik berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Selain menggunakan uji normalitas dengan

menggunakan metode perhitungan *Skewness* dan *Kurtosis* kemudian melihat uji Probability Plot, pengujian normalitas dapat menggunakan uji statistic non-parametik *kolmogorov smirnov*. Hasil uji *kolmogorov smirnov* dapat dilihat tabel berikut 4.3 dari hasil uji kolmogorov didapatkan bahwa asymp.sig sebesar 0.832 hal ini menunjukkan bahwa data yang ada terdistribusi dengan normal karena lebih besar dari 0.05.

Tabel 4.4

Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		103
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02925833
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.032
Kolmogorov-Smirnov Z		.623
Asymp. Sig. (2-tailed)		.832

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan pada model regresi antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik sebaiknya tidak ada korelasi antar variabel bebasnya.

Menganalisis multikolinearitas bias dilihat berdasarkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) yang berlawanan. Nilai *tolerance* harus menunjukkan jumlah yang lebih dari > 0.10 dan nilai VIF harus kurang dari < 10.0 . Maka, hal tersebut menunjukkan data tidak terdapat multikolinearitas. Apabila yang terjadi nilai *tolerance* kurang dari < 0.10 dan nilai VIF lebih dari >10.0 , maka itu menunjukkan bahwa didalam analisa data terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas yang dilakukan peneliti :

Tabel 4.5
Uji Multikolinearitas

Coefficients(a)

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Belanja Modal	.809	1.236
Dana Perimbangan	.809	1.236

a Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Dari tabel 4.5 dapat dipastikan bahwa variabel dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas karena nilai VIF dari tiap variabel masih berada < 10

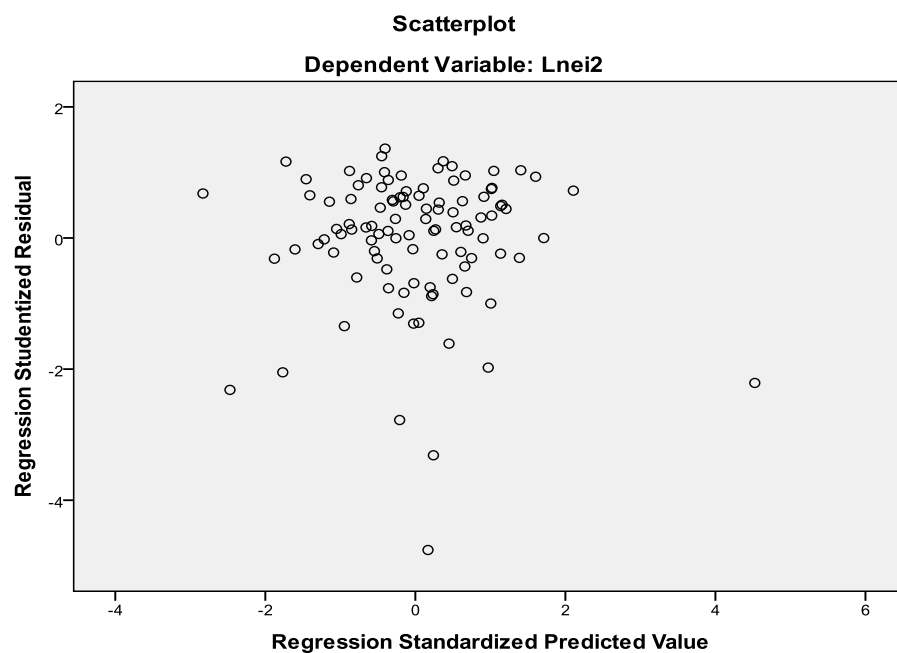
dengan nilai toleransi $>0,1$. Pada Belanja Modal nilai Tolerance sebesar 0,809 dan VIF sebesar 1.236 dan Dana Perimbangan nilai Tolerance sebesar 0,809 dan VIF sebesar 1.236.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas berfungsi untuk menunjukkan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari variabel pengganggu satu ke pengamatan yang lain. Prediksi dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan ZPRED dan nilai residual Dengan SRESID. Deteksi sementara bias dilihat pada grafik scatterplot.

Gambar 4.2

Grafik Scatterplot



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penyebaran titik secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y. maka, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala heterkedastisitas pada model regresi penelitian ini. Akan tetapi, untuk lebih memastikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini dilakukan uji park dengan terlebih dahulu mengabsolutkan nilai residual.

Hasil uji park sebagai berikut :

Tabel 4.6

Uji Park

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.696	1.790		-3.741	.000
	Ln_X1	1.170	.690	.178	1.696	.093
	Ln_X2	-1.658	1.741	-.100	-.952	.343

a Dependent Variable: Ln_ei

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai dari setiap variabel adalah 0,093 dan 0,343. Syarat bias lolos uji heteroskedastisitas adalah tingkat signifikansi diatas 5% atau 0.05. dapat dikatakan disini bahwa data telah lolos uji heteroskedastisitas melalui uji Park.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi menguji ada tidaknya korelasi antar variabel pengganggu periode sebelumnya. Dalam penelitian ini uji yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah dengan menggunakan *durbin watson*, yaitu dengan menggunakan angka *durbin watson* yang didapat dari hasil pengujian, kemudian dibandingkan dengan *durbin watson*. Berikut adalah tabel hasil dari uji *dubin watson*.

Tabel 4.7

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.681(a)	.463	.452	.02955	1.908

a Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Belanja Modal

b Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan tabel 4.6, hasil pengujian Durbin-Watson di dapat nilai $d_l = 1.6433$ dan $d_u = 1.7209$ sehingga nilai $4-d_l = 2.3567$ dan $4-d_u = 2.2791$. nilai d (1.908) terletak diantara d_u dan $4-d_u$ ($1.7209 < d < 2.2791$) yang berarti model regresi terbebas dari masalah autokorelasi.

4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik selanjutnya dapat melakukan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari Belanja Modal, Dana

Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda, dapatkan hasil regresi berikut :

Tabel 4.8

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	.340	.034	
	Belanja Modal	.007	.067	.009
	Dana Perimbangan	-.347	.042	-.677

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2014

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.7, dapat dituliskan model regresi sebagai berikut :

$$Y = 0.340 + 0.007BM - 0.347DP + e$$

Dimana :

Y = Kinerja Keuangan Daerah

α = konstanta

BM = Belanja Modal

DP = Dana Perimbangan

e = *Error*

Dari persamaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 0.340 mempunyai arti Belanja Modal dan Dana Perimbangan tetap (konstan) maka Kinerja Keuangan daerah akan bertambah sebesar 0.340 dalam rasio.
2. Koefisien Variabel Belanja Modal sebesar 0.007 mempunyai arti ketika Belanja Modal meningkat 1 satuan dari variabel lain mempunyai nilai 0, maka Kinerja Keuangan Daerah akan bertambah sebesar 0.007.
3. Koefisien variabel Dana Perimbangan sebesar -0.347 mempunyai arti ketika Dana Perimbangan meningkat 1 dan variabel lain mempunyai nilai 0, maka Kinerja Keuangan Daerah akan menurun sebesar -0.347. koefisien bertanda negatif yang berarti apabila Dana Perimbangan bertambah maka alokasi Kinerja Keuangan akan berkurang.

4.2.6 Uji t (parsial)

Uji t bertujuan memberikan gambaran sejauh mana pengaruh satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Pengukuran yang dipakai adalah dengan menggunakan perbandingan t_{tabel} dan t_{hitung} . Untuk itu dibentuklah hipotesis sebagai berikut :

H_0 : variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat.

H_a : variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel terikat.

Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau bila $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak dengan derajat kepercayaan 5% t_{tabel} sebesar 1,984

Berikut adalah tabel hasil dari uji T :

Tabel 4.9

Uji t

Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.340	.034		9.993	.000
Belanja Modal	.007	.067	.009	.110	.913
Dana Perimbangan	-.347	.042	-.677	-8.307	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian dapat diperoleh hasil :

a. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan (H_1) pada penelitian ini menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah pada provinsi di Jawa Tengah tahun 2010-2012. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.8, variabel belanja

modal memiliki $t_{hitung} = 0.110$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0.913. hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} > t_{hitung}$ ($1.984 > 0.110$) dan nilai signifikansi variabel $0.110 > 0.05$. sehingga hipotesis yang diajukan (H_1) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan (H_2) pada penelitian ini menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.8, dana perimbangan memiliki $t_{hitung} = -8.307$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1.984 < -8.307$) dan nilai signifikan variabel $0.000 < 0.05$. sehingga hipotesis yang diajukan (H_2) diterima dan dapat kesimpulan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2.7 Uji Signifikan Simultan (F)

Dalam analisis regresi berganda diperlukan sebuah pengujian untuk menguji variable-variabel penelitian secara simultan atau bersama-sama. Selain itu uji F ini juga akan menguji hipotesis yang keempat. Hipotesa akan diterima apabila $F_{tabel} > F_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau bila $F_{tabel} < F_{hitung}$ maka H_a diterima

dan H_0 ditolak dengan tingkat kesalahan 5% maka F_{tabel} sebesar . Berikut adalah table hasil uji F:

Tabel 4.10

Uji F

ANOVA(b)

Model		F	Sig.
1	Regression	43.139	.000(a)
	Residual		
	Total		

a Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Belanja Modal

b Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan table di atas maka disimpulkan dengan tingkat kesalahan 5%, semua variabel bebas secara simultan signifikan berpengaruh positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ini dapat dilihat dari nilai $F_{\text{tabel}} < F_{\text{hitung}}$ ($3.09 < 43.139$) dan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai α yang sebesar 0,05 atau 5%. Dengan demikian hipotesis H_3 diterima. Hal ini berarti belanja modal, Dana Perimbangan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

4.2.8 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan sejauh mana variabel-variabel independen maupun memprediksi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinan berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Berikut table hasil output dari uji koefisien determinasi.

Table 4.11

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681(a)	.463	.452	.02955

a Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Belanja Modal

Dari tabel diatas dapat terlihat *adjusted R²* dari variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebesar 0,452. Hal ini berarti bahwa 45,2% dari Kinerja Keuangan Daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas dalam penelitian ini, sedangkan sisanya 54,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak terdapat pada model regresi yang diajukan.

C. Pembahasan

4.3.1 Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dari hasil uji t yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, menunjukkan hasil bahwa tidak adanya pengaruh parsial Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi X_1 yang jauh diatas standar 0.05. hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil t-hitung diperoleh jumlah 0.110, sedangkan dalam t-tabel 1.984, berdasarkan besaran t-hitung < t-tabel maka bisa dipastikan memang belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Gideon S (2013) serta Nugroho *et al.* (2012), yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua penelitian ini dilakukan di daerah Riau dan Jawa.

Alokasi belanja modal diperuntukkan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dana tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pangadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya.

Mardiasmo (2002), mengatakan bahwa anggaran tidak perlu dibuat terlalu besar jumlahnya namun tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah seperti kebocoran anggaran. Sama halnya jika suatu daerah telah menganggarkan belanja modal dengan nilai yang besar namun realisasi yang dilakukan terhadap belanja modal tersebut kurang efektif sehingga efeknya terhadap pembangun terhambat dan membuat kinerja keuangan pemerintah menurun. Berapapun realisasi belanja modal, banyak atau sedikit, jika tidak direncanakan dengan matang maka hasilnya tidak akan efektif. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang dilansir dalam situs berita kompasiana.com (2013), di Indonesia terdapat 183 kabupaten diindonesia yang mengeluarkan dana untuk belanja pegawai yang sangat tinggi dibandingkan dengan belanja modal dan barang. Kabupaten klaten berada di urutan ke – empat sebagai daerah yang menggelontorkan dana untuk belanja pegawai hingga 69,9% sedangkan belanja barang dan belanja modal hanya 11%. kondisi APBD seperti menggambarkan bahwa sebagian besar dana keuangan klaten hanya digunakan untuk pembayaran gaji pegawai. Padahal belanja modal fasilitas umum itu dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, puskesmas, jembatan, rumah sakit, jalan dan irigasi. Namun Minimnya belanja modal membuat terhambatnya pembangunan pada daerah tersebut jika hal ini terus dibiarkan makan akan membuat daerah tersebut bangkrut dan Kinerja keuangan pemerintah daerah munurun.

**Tabel 4.12 Data Realisasi Jawa belanja Modal
dan Belanja Pegawai di Prov. Jawa Tengah**

Tahun	Belanja Modal	Belaja Pegawai
2010	3,247,566	19,790,494
2011	4,656,177	22,159,180
2012	6,634,561.834	25,139,858

Dalam penelitian ini, seharusnya alokasi belanja modal pada pemerintahan daerah sebesar 30% sampai 50% dari anggaran belanja pemerintah daerah. Jika dilihat dari hasil penelitian ini bahwa alokasi belanja modal belum terealisasi dengan baik. Minimnya anggaran belanja modal disebabkan oleh belanja pegawai yang terlalu besar. Belanja pegawai yang telalu besar jika dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan kebangkrutan yang mengancam daerah tersebut dalam 2-3 tahun mendatang. Di Provinsi Jawa Tengah yang belanja pegawainya melebihi 60% dalam APBD yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Karanganyar.

Besarnya belanja pegawai membuat pengurangan terhadap belanja modal, sehingga kesejahteraan yang didapat oleh rakyat berkurang. Seharusnya dengan adanya belanja modal pemerintah daerah dapat membangun fasilitas umum seperti

pembangunan gedung, puskesmas, jembatan, rumah sakit, jalan hingga irigasi. Hal ini membuat masyarakat yang merasakan fasilitas-fasilitas merasa puas akan pembangunan dan perubahan yang terjadi pada daerah mereka. Semakin banyak pembangunan yg dilakukan oleh pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, belanja modal yang merupakan bagian dari belanja daerah dapat disimpulkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012. Semakin tinggi alokasi belanja modal maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

4.3.2 Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan menunjukkan pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis (H_2) yang mengatakan dana perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sehingga H_2 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gideon S (2013) yang menyatakan *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kepulauan Riau. Selain itu terdapat penelitian dari Ebit *et al*, (2012) yang menyatakan dana perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja keuangan pemerintah.

Suatu daerah dikatakan telah berhasil dalam menjalankan otonomi apabila daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang baik. Tingkat kemandirian

dilihat dari seberapa besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dengan PAD yang bisa dihasilkan daerah tersebut. Dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan asli daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah menunjukkan semakin kuat pemerintahan daerah bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan menurun(Ebit *et al*,2012).

Pada hasil penelitian ini, besarnya dana perimbangan dibandingkan dengan PAD menunjukkan bahwa provinsi diJawa Tengah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa berbagai daerah di Jawa Tengah memiliki sumber daya alam, namun sumber daya alam pada daerah tersebut belum dioptimalkan dengan baik pada daerahnya. Seperti tempat wisata jika dikelola dengan baik maka tempat wisata itu akan menambah pendapatan dari daerah tersebut. Dengan meningkatkan PAD membuat daerah tersebut lebih mandiri dengan tidak terlalu bergantung terhadap dana Perimbangan. Semakin kecil dana perimbangan maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya..

Jadi dapat disimpulkan Dana Perimbangan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012.

4.3.3 Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh belanja modal, dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif signifikan secara statistic terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan H_3 , sehingga H_3 diterima. Hasil uji koefisien determinasi merupakan uji yang menjadi landasan diterimanya H_3 . Pada uji tersebut, hasil *adjusted R²* yang menjadi tolak ukur pengaruh variabel independen secara simultan menunjukkan hasil 0.452. hal ini mengandung makna bahwa sebanyak 45.2% variabel dependen dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen, sdangkan 54,8% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dan tidak diteliti berdasarkan model regresi penelitian ini.

Pemerintahan akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana yang diperlukan oleh Negara, yang tercermin didalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan saran yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah.

Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima maka menunjukkan bahwa semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Jadi semakin banyak pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana maka akan membuat PAD meningkat dengan begitu daerah akan lebih mandiri lagi dan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga bisa dilihat kinerja keuangan daerah semakin baik.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara belanja modal, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Periode penelitian diambil selama 3 tahun yaitu sejak tahun 2010-2012 dengan sampel seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena besarnya anggaran belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal membuat pembangunan terhadap daerah tersebut berkurang. Sehingga semakin sedikit pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Dana perimbangan memiliki pengaruh dengan arah negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya jika dana perimbangan besar maka kinerja keuangan daerah menurun. hal ini dapat dijelaskan dengan bergantungnya pemerintah daerah pada dana transfer pemerintah pusat, tanpa meningkatkan PAD pada daerahnya. Ini menunjukkan

bahwa pemerintahan tersebut tidak mandiri dalam membangun daerahnya dan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

3. Secara simultan belanja modal, dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel-variabel independen yang diajukan dalam penelitian ini adalah belanja modal, dana perimbangan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 45.2%. sedangkan sisanya sebesar 54.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

B. IMPLIKASI

1. Implikasi dari belanja modal dalam kehidupan yaitu dengan belanja modal maka pemerintah dapat membangun dan menambah aset pada daerahnya. Seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya. Sehingga struktur belanja modal pun perlu mendapat perhatian khusus, Karena tidak semua belanja modal berefek pada pelayanan publik. Untuk itu, belanja modal perlu lebih rinci untuk menemukan belanja modal yang berefek pada pelayanan publik, misalkan belanja modal infrastruktur. Dengan mengalokasikan belanja modal secara optimal maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Implikasi dari Dana perimbangan dalam kehidupan yaitu dengan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah membantu pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah. Besarnya dana perimbangan

menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut tidak mandiri dalam mengelola keuangannya. Meningkatkan PAD adalah salah satu cara untuk daerah tersebut agar tidak terus menerus bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Semakin kecil dana perimbangannya maka semakin bagus kinerja keuangan daerah pada daerah tersebut.

C. Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan diantaranya adalah:

1. Bagi peneliti berikutnya :
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah tahun pengamatan menjadi 5 tahun atau lebih sehingga hasil yang didapat maksimal.
 - b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan populasi menjadi seluruh Provinsi di Indonesia untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
 - c. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diganti dengan menggunakan pengukuran Rasio Kemandirian keuangan daerah, Rasio Upaya fiskal, Rasio keserasian, Rasio efisien dan Rasio Efektivitas.
 - d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain selain dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Lain-lain yang sah.

2. Bagi pemerintahan

Diharapkan pemerintah pusat merealisasikan batas maksimal untuk belanja modal dan batas minimum belanja pegawai sehingga belanja modal dapat direalisasikan dengan baik lagi. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten/kota agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan agar dapat membiayai belanja daerahnya sendiri sehingga mengurangi transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai belanjannya. Sehingga pemerintah daerah dapat lebih mandiri lagi dalam membangun daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Adji. 2011. *Transportasi Dan Pengembangan Wilayah : Graham Ilmu*. Yogyakarta.
- Aramana, Desi. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderating Pada Propinsi Sumatera Utara*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medand
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik – suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. www.djpk.depkeu.go.id (diakses pada tanggal 27 juli 2013)
- Elmi, Bacrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. UI-Press. Jakarta
- Florida, Asha. 2006. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis, Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan
- Ghazali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Sektor Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Damanyanti, Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bungan Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 2. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Juliawati, Ebit et al. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhdap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Vol. 1 No.1, Agustus 2012, pp. 1-15.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Koswara, E. 2001. *Otonomi daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Yayasan Pariba. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Penerbit Andi Yogyakarta*.

- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Nachrowi, D Nachrowi. Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan* : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nordiawan et al. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Nordiawan, Deddy dan Hertianti, Ayuningtyas, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Fajar, 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Diponegoro. Semarang. Vol. 1 No.12, Tahun 2012, PP. 1-14.
- Permen No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rachmawati, Nur. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi belanja Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sari, Noni Puspita dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah/Kota di Propinsi Riau*. Jurnal Akuntansi 42. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Simanjuntak Oloan. 2003. *Hukum Pajak*. Nomensen-press. Medan.
- Simanullang, Gideon, 2013. *Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang. Vol. 1 No.1, Tahun 2013.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesembilan, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sularso, Havid. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto
- Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malahng
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta. 2004.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta. 2004.

Wenny, Cherrya Dhia, 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta

Yuwono, Sony. Dkk. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publising. Surabaya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1
Data Realisasi Belanja Modal tahun 2010-2012

Kabupaten/kota	BM (2010) TB	total	TB	Total BM (2012)TB	BM (2011) total
		kab. Banjarnegara			
155,215					
864,062	0.18		160,076		1,037,963
0.15		158,301	1,111,150		0.14
kab. Banyumas	103,063	1,178,380	0.09	169,316	1,476,266
0.11		234,952	1,732,240		0.14
kab. Batang	25,479	569,728	0.04	88,042	747,720
0.12		133,480	862,095		0.15
kab. Blora	53,347	797,077	0.07	105,829	925,821
0.11		219,108	1,125,140		0.19
kab. Boyolali	100,101	909,091	0.11	138,437	1,098,880
0.13		207,759	1,266,280		0.16
kab. Brebes	131,399	1,100,002	0.12	142,729	1,303,900
0.11		192,983	1,388,040		0.14
kab. Cilacap	163,912	1,237,239	0.13	203,565	1,550,278
0.13		308,872	1,714,290		0.18
kab. Demak	126,893	825,295	0.15	234,922	1,052,911
0.22		339,018	1,207,870		0.28
kab. grobongan	91,688	901,487	0.10	161,322	1,172,116
0.14		190,075	1,202,190		0.16
kab. Jepara	119,766	852,318	0.14	212,928	1,095,749
0.19		297,197	1,257,040		0.24
kab. Karanganyar	105,157	876,227	0.12	86,229	978,181
0.09		122,761	1,171,210		0.10
kab. Kebumen	118,772	1,009,115	0.12	187,138	1,175,415
0.16		295,209	1,360,050		0.22
kab. Kedal	134,271	908,118	0.15	199,990	1,109,886
0.18		192,582	1,163,990		0.17
kab. Klaten	40,142	1,043,889	0.04	130,546	1,316,273
0.10		182,607	1,439,160		0.13
kab. Kudus	165,093	903,109	0.18	125,457	947,776
0.13		178,143	1,147,950		0.16
kab. Magelang	97,926	972,057	0.10	84,900	1,061,734
0.08		95,351	1,146,500		0.08
kab. Pati	68,355	989,491	0.07	89,665	1,197,268
0.07		174,150	1,421,940		0.12
kab. Pekalongan	73,291	725,165	0.10	97,246	895,019
0.11		124,487	1,008,580		0.12
kab. Pemasang	77,174	926,831	0.08	128,206	1,178,756
0.11		128,367	1,196,450		0.11
kab. Purbalingga	43,188	686,627	0.06	66,386	902,544
0.07		126,673	1,084,090		0.12

kab. Purworejo	62,069	815,860	0.08	87,865	968,311
0.09		149,105	1,123,310	0.13	
kab. Rembang	92,130	682,413	0.14	187,993	868,067
0.22		200,204	969,132	0.21	
kab. Semarang	76,039	808,714	0.09	160,539	1,042,027
0.15		264,417	1,178,650	0.22	
kab. Seragen	86,364	902,841	0.10	70,837	1,030,137
0.07		125,506	1,196,730	0.10	
kab. Sukoharjo	62,128	780,224	0.08	97,154	968,241
0.10		233,724	1,196,800	0.20	
kab. Tegal	131,061	959,765	0.14	145,856	1,115,789
0.13		303,315	1,347,310	0.23	
kab. Temanggung	44,834	662,150	0.07	93,034	816,161
0.11		162,080	912,680	0.18	
kab. Wonogiri	103,312	963,984	0.11	111,320	1,091,699
0.10		185,814	1,302,180	0.14	
kab. Wonosobo	39,161	674,386	0.06	119,761	888,438
0.13		189,467	986,537	0.19	
kota magelang	47,661	410,623	0.12	81,027	469,412
0.17		79,136	536,349	0.15	
kota pekalongan	56,559	408,564	0.14	82,344	489,617
0.17		103,506	538,564	0.19	
kota salatiga	89,643	418,616	0.21	77,409	458,618
0.17		124,905	551,635	0.23	
kota semarang	216,489	1,732,662	0.12	305,704	2,036,583
0.15		351,854	2,053,330	0.17	
kota surakarta	79,762	825,859	0.10	128,443	982,646
0.13		186,150	1,145,170	0.16	
kota tegal	66,120	474,361	0.14	93,963	572,010
0.16		73,304	586,687	0.12	

Lampiran 2

Data Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2010-2012

	DP (2010)	TP	total	DP (2011)	TP	total
kab. Banjarnegara	615,051		677,537		0.91	
672,411	743,518	0.90		794,742		
889,013	0.89					
kab. Banyumas	877,105	1,041,997	0.84			
1,001,666	1,193,565	0.84		1,197,890		
1,439,997	0.83					
kab. Batang	503,872	549,294	0.92			
573,027	633,182	0.90		677,708		
762,428	0.89					
kab. Blora	656,795	703,883	0.93			
712,375	779,397	0.91		817,542		
899,529	0.91					
kab. Boyolali	689,906	776,392	0.89			
757,146	776,403	0.98		893,578		
1,021,303	0.87					
kab. Brebes	867,015	938,040	0.92			
922,818	1,001,093	0.92		1,127,360		
1,229,167	0.92					
kab. Cilacap	988,063	1,137,772	0.87			
1,067,911	1,240,238	0.86		1,250,040		
1,446,713	0.86					
kab. Demak	601,422	658,178	0.91			
659,398	733,957	0.90		797,462		
902,825	0.88					
kab. grobongan	746,052	824,419	0.90			
805,408	893,320	0.90		976,817		
1,082,280	0.90					
kab. Jepara	670,275	754,988	0.89			
727,835	831,477	0.88		853,436		
982,513	0.87					
kab. Karanganyar	624,772	704,282	0.89			
679,253	783,333	0.87		837,078		
953,785	0.88					
kab. Kebumen	754,913	813,655	0.93	856,995		
	930,508	0.92		1,056,310		
1,158,684	0.91					
kab. Kedal	643,064	729,300	0.88			
	698,282	791,572	0.88	845,851		
966,013	0.88					

kab. Klaten	845,975	900,861	0.94	
920,808		993,099	0.93	1,098,160
1,182,916		0.93		
kab. Kudus	623,439	717,472	0.87	
669,998		778,457	0.86	825,555
946,572		0.87		
kab. Magelang	757,580	833,638	0.91	
798,006		888,469	0.90	979,144
1,102,867		0.89		
kab. Pati	745,708	858,235	0.87	
809,998		891,360	0.91	997,545
1,161,279		0.86		
kab. Pekalongan				
592,089	659,669	0.90		
649,099		730,462	0.89	790,945
905,738		0.87		
kab. Pemalang	728,761	805,202	0.91	
781,421		861,099	0.91	965,594
1,063,545		0.91		
kab. Purbalingga		554,264	634,068	0.87
630,615		725,562	0.87	757,604
861,360		0.88		
kab. Purworejo	628,258	697,868	0.90	
690,787		779,728	0.89	828,201
926,463		0.89		
kab. Rembang	502,913	568,612	0.88	
572,040		645,972	0.89	692,398
795,703		0.87		
kab. Semarang	611,256	710,088	0.86	
681,283		814,482	0.84	119,208
275,312		0.43		
kab. Seragen	653,057	732,684	0.89	
728,600		823,119	0.89	890,242
1,017,938		0.87		
kab. Sukoharjo	620,124	684,570	0.91	
657,247		753,414	0.87	760,616
925,570		0.82		
kab. Tegal	748,837	821,899	0.91	
812,995		903,128	0.90	990,986
1,109,728		0.89		
kab. Temanggung		522,186	577,397	0.90
574,917		638,261	0.90	707,239
785,754		0.90		
kab. Wonogiri	734,169	799,138	0.92	
803,583		880,725	0.91	948,633
1,048,670		0.90		
kab. Wonosobo	540,908	592,987	0.91	

		590,833		658,232	0.90		697,594
		779,929		0.89			
kota magelang	298,383		357,931	0.83			
		340,256		403,814	0.84		397,902
		489,217		0.81			
kota pekalongan		317,579	365,075	0.87			
		345,127		408,472	0.84		410,000
		501,206		0.82			
kota salatiga	285,799		337,348	0.85			
		308,553		369,164	0.84		387,038
		464,837		0.83			
kota semarang	967,153		1,295,145	0.75			
		969,375		1,490,913	0.65		1,167,240
		1,946,857		0.60			
kota surakarta	610,716		724,662	0.84			
		578,792		759,889	0.76		710,270
		941,942		0.75			
kota tegal	296,503		397,825	0.75			
		312,562		429,806	0.73		394,763
		551,426		0.72			

Lampiran 3

Data Realisasi Kinerja Keuangan pemerintah Daerah

	PAD (2010)	TP	total	PAD (2011)	TP	
kab. Banjarnegara	849,713	62,487	0.073539	1,078,603		
71,107	0.065925		94,271	1,193,100		0.08
kab. Banyumas	1,221,546	164,892	0.134987	1,593,406		
191,900	0.120434		242,107	1,815,450		0.13
kab. Batang	644,772	45,422	0.070446	820,067		
60,155	0.073354		84,720	933,944		0.09
kab. Blora	809,229	47,088	0.058188	1,007,776		
67,022	0.066505		81,987	1,127,250		0.07
kab. Boyolali	917,899	86,486	0.094221	1,096,014		
96,738	0.088263		127,725	1,271,240		0.10
kab. Brebes	1,103,003	71,025	0.064393	1,315,224		
78,276	0.059515		101,807	1,567,080		0.06
kab. Cilacap	1,334,620	149,709	0.112174	1,639,234		
172,327	0.105127		196,673	1,792,440		0.11
kab. Demak	851,907	56,756	0.066622	1,132,136		
74,559	0.065857		105,363	1,209,430		0.09
kab. grobongan	943,967	78,366	0.083018	1,163,858		
87,912	0.075535		105,463	1,323,840		0.08
kab. Jepara	902,872	84,713	0.093827	1,170,173		
103,642	0.08857		129,077	1,304,000		0.10
kab. Karanganyar	874,554	79,510	0.090915	1,043,598		
104,081	0.099733		116,707	1,228,680		0.09
kab. Kebumen	978,115	58,742	0.060057	1,273,276		
73,513	0.057735		102,374	1,446,690		0.07
kab. Kedal	901,334	86,235	0.095675	1,136,759		
93,290	0.082066		120,162	1,158,340		0.10
kab. Klaten	1,060,177	54,886	0.051771	1,364,125		
72,291	0.052994		84,756	1,511,540		0.06
kab. Kudus	837,477	94,033	0.112281	1,005,233		
108,459	0.107894		121,017	1,147,300		0.11
kab. Magelang	954,275	76,058	0.079702	1,114,475		
90,463	0.081171		123,723	1,311,900		0.09
kab. Pati	1,001,675	112,527	0.112338	1,229,009		
134,476	0.109418		163,734	1,477,990		0.11
kab. Pekalongan	749,729	67,580	0.09014	923,341		
81,363	0.088118		114,793	1,114,530		0.10
kab. Pemasang	933,714	76,441	0.081868	1,188,521		
79,678	0.067039		97,951	1,344,380		0.07
kab. Purbalingga	724,034	79,803	0.11022	954,180		
94,946	0.099506		103,756	1,087,800		0.10

kab. Purworejo	802,215	69,609	0.086771	1,013,075	
88,942	0.087794		98,262	1,012,300	0.10
kab. Rembang	681,401	65,699	0.096418	873,465	
73,932	0.084642		103,305	1,017,710	0.10
kab. Semarang	843,410	98,831	0.11718	1,099,477	
133,199	0.121148		156,104	567,620	0.28
kab. Seragen	883,149	79,627	0.090163	1,094,586	
94,519	0.086351		127,696	1,308,940	0.10
kab. Sukoharjo	797,612	64,446	0.080799	1,015,438	
96,167	0.094705		164,954	1,217,490	0.14
kab. Tegal	946,107	73,063	0.077225	1,204,378	
90,133	0.074838		118,742	1,354,750	0.09
kab. Temanggung	675,660	55,211	0.081714	823,480	
63,343	0.076922		78,515	966,816	0.08
kab. Wonogiri	981,561	64,969	0.066189	1,166,580	
77,142	0.066126		100,037	1,339,810	0.07
kab. Wonosobo	708,104	52,079	0.073547	979,683	
67,399	0.068796		82,335	1,031,050	0.08
kota magelang	401,911	59,548	0.148162	505,439	
63,558	0.125748		91,315	579,717	0.16
kota pekalongan	417,192	47,496	0.113846	509,929	
63,345	0.124223		91,206	614,167	0.15
kota salatiga	411,504	51,550	0.125271	478,174	
60,611	0.126756		77,799	562,324	0.14
kota semarang	1,623,567	327,992	0.20202	2,053,920	
521,538	0.253923		779,617	2,533,680	0.31
kota surakarta	858,514	113,946	0.132725	1,029,524	
181,097	0.175903		231,672	1,239,450	0.19
kota tegal	460,931	101,322	0.21982	547,718	
117,244	0.21406		156,663	650,805	0.24

Lampiran 4

Hasil Outlier

Casewise Diagnostics(a)

Case Number	Std. Residual	VAR00001	Predicted Value	Residual
1	1.252	.14	.0939	.04110
2	-.089	.07	.0729	-.00294
3	.700	.13	.1020	.02296
4	-.094	.06	.0611	-.00309
5	1.964	.20	.1376	.06443
6	.356	.09	.0823	.01169
7	-.099	.06	.0673	-.00326
8	.807	.11	.0855	.02649
9	-.887	.07	.0961	-.02912
10	1.086	.13	.0974	.03564
11	.465	.08	.0678	.01525
12	.266	.09	.0853	.00873
13	-.179	.09	.0969	-.00586
14	-.447	.06	.0747	-.01466
15	-.004	.10	.0961	-.00012
16	-.412	.05	.0655	-.01353
17	.845	.11	.0843	.02772
18	.373	.08	.0678	.01225
19	.762	.11	.0870	.02500
20	.678	.09	.0678	.02225
21	.306	.08	.0719	.01005

22	1.032	.11	.0761	.03386
23	.459	.09	.0719	.01505
24	.327	.10	.0853	.01073
25	.704	.12	.0939	.02310
26	.114	.09	.0863	.00375
27	.276	.08	.0719	.00905
28	.312	.08	.0668	.01024
29	.186	.08	.0759	.00611
30	-.497	.07	.0823	-.01631
31	1.897	.15	.0858	.06224
32	-.178	.07	.0798	-.00584
33	1.101	.11	.0779	.03613
34	-.539	.07	.0917	-.01768
35	3.015	.22	.1211	.09894
36	-.205	.12	.1267	-.00671
37	-.840	.07	.1006	-.02756
38	.280	.13	.1178	.00917
39	-.918	.07	.0971	-.03011
40	2.105	.25	.1849	.06907
41	-.488	.09	.1040	-.01602
42	-1.244	.06	.1008	-.04081
43	-.421	.11	.1188	-.01382
44	-2.331	.07	.1425	-.07650
45	.728	.18	.1521	.02388
46	-.846	.08	.1038	-.02777
47	-1.202	.09	.1284	-.03944
48	-.604	.10	.1198	-.01981
49	-1.605	.06	.1107	-.05268
50	-1.535	.08	.1324	-.05038

51	-1.690	.05	.1085	-.05546
52	-.104	.11	.1114	-.00342
53	-.401	.08	.0941	-.01315
54	-.232	.11	.1166	-.00760
55	-.390	.09	.1008	-.01281
56	-1.481	.07	.1156	-.04861
57	-.506	.10	.1166	-.01660
58	-.631	.09	.1087	-.02070
59	-.963	.09	.1166	-.03159
60	-.257	.12	.1294	-.00842
61	-.820	.09	.1129	-.02690
62	-.748	.10	.1196	-.02456
63	-.997	.08	.1077	-.03272
64	-.726	.08	.1008	-.02381
65	-1.181	.07	.1048	-.03876
66	.475	.13	.1104	.01557
67	-2.082	.07	.1373	-.06832
68	.526	.12	.1067	.01727
69	-1.933	.07	.1294	-.06342
70	2.021	.21	.1477	.06632
71	.553	.13	.1149	.01813
72	.069	.09	.0887	.00228
73	1.111	.14	.1015	.03646
74	-.449	.07	.0877	-.01473
75	1.808	.21	.1487	.05934
76	.013	.10	.0996	.00043
77	-.843	.07	.0927	-.02767
78	.333	.11	.0991	.01092
79	-.744	.09	.1114	-.02441

80	1.198	.19	.1477	.03932
81	-.145	.08	.0848	-.00477
82	-.521	.10	.1161	-.01710
83	-.410	.10	.1085	-.01346
84	-.487	.07	.0870	-.01599
85	.481	.10	.0882	.01577
86	-1.012	.06	.0892	-.03321
87	.391	.11	.0922	.01283
88	.334	.09	.0830	.01095
89	-.020	.11	.1117	-.00066
90	.187	.10	.0969	.00614
91	-.622	.07	.0934	-.02041
92	-.170	.10	.1006	-.00556
93	1.252	.10	.0559	.04109
94	-.114	.10	.1057	-.00374
95	-.134	.28	.2794	-.00441
96	-.319	.10	.1085	-.01046
97	.208	.14	.1282	.00681
98	.038	.09	.0867	.00126
99	-.213	.08	.0880	-.00698
100	-.651	.08	.0964	-.02137
101	1.660	.16	.1035	.05448
102	-.799	.08	.1062	-.02623
103	1.191	.15	.1099	.03907
104	-.980	.08	.1112	-.03217
105	3.196	.24	.1351	.10487

a Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Casewise Diagnostics(a)

Case Number	Std. Residual	VAR00001	Predicted Value	Residual
1	1.361	.14	.0925	.04250
2	-.055	.07	.0717	-.00172
3	.721	.13	.1025	.02253
4	-.098	.06	.0611	-.00308
5	2.165	.20	.1344	.06760
6	.387	.09	.0819	.01209
7	-.123	.06	.0679	-.00385
8	.854	.11	.0853	.02668
9	-.920	.07	.0957	-.02874
10	1.186	.13	.0960	.03704
11	.482	.08	.0679	.01506
12	.279	.09	.0853	.00872
13	-.156	.09	.0959	-.00487
14	-.476	.06	.0749	-.01486
15	.008	.10	.0957	.00026
16	-.407	.05	.0647	-.01271
17	.862	.11	.0851	.02691
18	.386	.08	.0679	.01206
19	.846	.11	.0856	.02641
20	.706	.09	.0679	.02206
21	.335	.08	.0715	.01046
22	1.117	.11	.0751	.03487
23	.495	.09	.0715	.01546
24	.343	.10	.0853	.01072
25	.784	.12	.0925	.02450

26	.146	.09	.0855	.00454
27	.303	.08	.0715	.00946
28	.296	.08	.0678	.00924
29	.221	.08	.0751	.00692
30	-.509	.07	.0819	-.01591
31	2.006	.15	.0854	.06263
32	-.148	.07	.0786	-.00463
33	1.144	.11	.0783	.03573
34	-.580	.07	.0921	-.01810
35	3.229	.22	.1192	.10085
36	-.126	.12	.1239	-.00393
37	-.845	.07	.0994	-.02637
38	.331	.13	.1167	.01034
39	-.926	.07	.0959	-.02892
40	2.376	.25	.1798	.07421
41	-.475	.09	.1028	-.01483
42	-1.262	.06	.0994	-.03942
43	-.379	.11	.1168	-.01184
44	-2.400	.07	.1409	-.07495
45	.885	.18	.1484	.02764
46	-.858	.08	.1028	-.02679
47	-1.219	.09	.1271	-.03808
48	-.545	.10	.1170	-.01702
49	-1.655	.06	.1097	-.05170
50	-1.557	.08	.1306	-.04862
51	-1.712	.05	.1065	-.05347
52	-.059	.11	.1098	-.00184
53	-.370	.08	.0925	-.01155
54	-.148	.11	.1136	-.00461

55	-0.366	.09	.0994	-.01142
56	-1.487	.07	.1134	-.04643
57	-.436	.10	.1136	-.01361
58	-.593	.09	.1065	-.01851
59	-1.007	.09	.1164	-.03143
60	-.200	.12	.1273	-.00626
61	-.772	.09	.1101	-.02411
62	-.704	.10	.1170	-.02197
63	-1.003	.08	.1063	-.03133
64	-.718	.08	.0994	-.02242
65	-1.184	.07	.1030	-.03697
66	.523	.13	.1097	.01635
67	-2.093	.07	.1344	-.06535
68	.571	.12	.1062	.01785
69	-1.961	.07	.1273	-.06126
70	2.218	.21	.1447	.06928
71	.631	.13	.1133	.01971
72	.073	.09	.0887	.00227
73	1.141	.14	.1024	.03562
74	-.498	.07	.0886	-.01555
75	1.930	.21	.1477	.06027
76	.026	.10	.0992	.00081
77	-.874	.07	.0923	-.02728
78	.349	.11	.0991	.01090
79	-.822	.09	.1127	-.02566
80	1.354	.19	.1447	.04228
81	-.166	.08	.0852	-.00519
82	-.555	.10	.1163	-.01734
83	-.367	.10	.1065	-.01147

84	-.558	.07	.0884	-.01742
85	.492	.10	.0886	.01536
86	-1.051	.06	.0888	-.03282
87	.410	.11	.0922	.01281
88	.383	.09	.0820	.01196
89	.036	.11	.1099	.00112
90	.228	.10	.0959	.00713
91	-.622	.07	.0924	-.01941
92	-.140	.10	.0994	-.00437
93	1.271	.10	.0573	.03970
94	-.127	.10	.1060	-.00397
95	.143	.28	.2705	.00447
96	-.271	.10	.1065	-.00847
97	.255	.14	.1270	.00797
98	-.012	.09	.0884	-.00037
99	-.243	.08	.0886	-.00760
100	-.665	.08	.0958	-.02078
101	1.769	.16	.1027	.05526
102	-.835	.08	.1061	-.02606
103	1.263	.15	.1096	.03944
104	-.986	.08	.1098	-.03079

a Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Lampiran 5

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan	105	.05	.28	.1031	.04337
Belanja Modal	105	.04	.28	.1356	.04840
Dana Perimbangan	105	.21	.82	.6922	.07795
Valid N (listwise)	105				

Lampiran 6

Hasil Uji Normal dengan Skewness Kurtosis

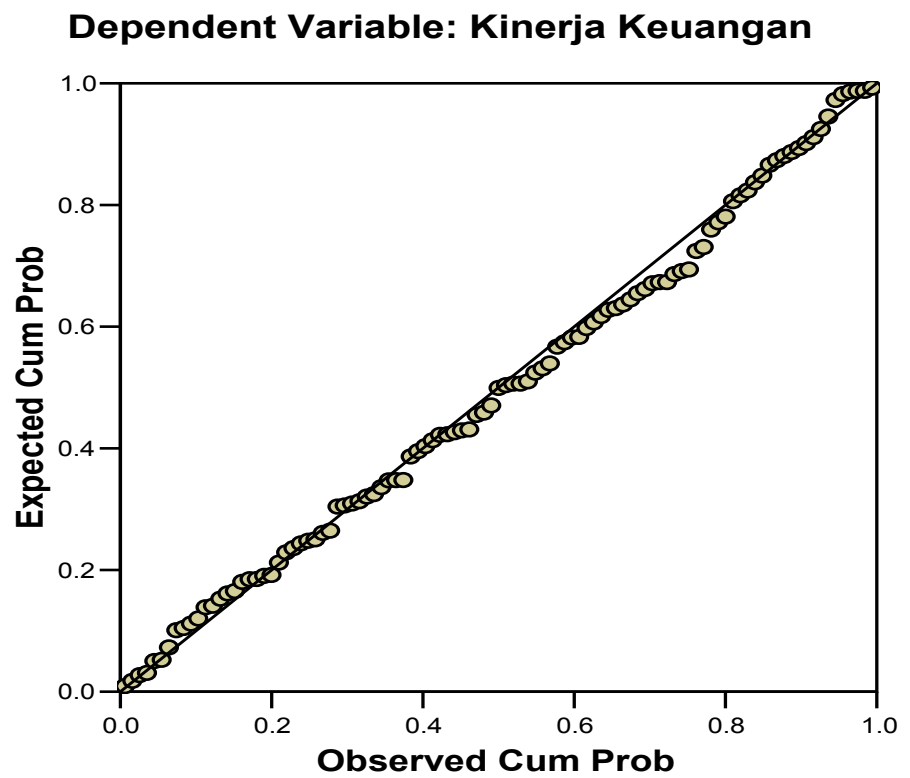
Descriptive Statistics

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	103	0.241	0.238	0.074	0.472
Valid N (listwise)	103				

Lampiran 7

Hasil Uji *Normal Probability Plot*

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 8

Hasil Uji Normal dengan Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		103
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02925833
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.032
Kolmogorov-Smirnov Z		.623
Asymp. Sig. (2-tailed)		.832

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 9

Hasil Uji Multikolerasi

Coefficients(a)

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Belanja Modal	.809	1.236
	Dana Perimbangan	.809	1.236

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Lampiran 10

Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.696	1.790		-3.741	.000
	Ln_X1	1.170	.690	.178	1.696	.093
	Ln_X2	-1.658	1.741	-.100	-.952	.343

a Dependent Variable: Ln_ei

Lampiran 11

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.681(a)	.463	.452	.02955	1.908

a Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Belanja Modal

b Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Lampiran 12

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.340	.034		9.993	.000
	Belanja Modal	.007	.067	.009	.110	.913
	Dana Perimbangan	-.347	.042	-.677	-8.307	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Lampiran 13

Hasil Uji t

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.340	.034		9.993	.000
	Belanja Modal	.007	.067	.009	.110	.913
	Dana Perimbangan	-.347	.042	-.677	-8.307	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Lampiran 14

Hasil Uji F

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.075	2	.038	43.139	.000(a)
	Residual	.087	100	.001		
	Total	.163	102			

a Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Belanja Modal

b Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Lampiran 15

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681(a)	.463	.452	.02955

a Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Belanja Modal

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Indah Permata Nurmala, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Januari 1992. Anak kedua dari pasangan Nurman dan Harmeni Astuti Angayani. Penulis mempunyai satu kaka perempuan dan satu adik perempuan. Alamat tempat tinggal berada di jalan Balai Rakyat No.19 Rt 11/01, Cakung, Jakarta Timur 13910.

Penulis telah menempuh beberapa tingkat pendidikan formal, yaitu Sekolah Dasar Negeri 03Pagi (1998-2003), Sekolah Menengah Pertama Negeri 256 Jakarta (2006-2009), Sekolah Menengah Atas Negeri 89 Jakarta (2006-2009), serta menjadi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi angkatan 2009. Penulis memiliki pengalaman bekerja sebagai mahasiswi PKL di RSUP. Persahabatan (2012).